

Hengki Kurniawan Jabat Plt Bupati Bandung Barat

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah menetapkan Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan sebagai Plt Bupati Bandung Barat, terhitung sejak Senin (12/4). Hal ini menyusul ditetapkannya Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat Covid-19.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Faisal menyebutkan, telah menerima formulir berita penetapan Hengki Kurniawan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat.

"Formulir berita itu bernomor 15/KU.12/Pem otda yang dibuat tanggal 9 April 2021. Kami terima suratnya pada Senin (12/4) pagi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," terang Faisal, Selasa (13/4).

Dijelaskannya, sekarang bentuknya sudah tidak ada lagi surat keputusan (SK). Tapi langsung formulir berita dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ditandatangani secara elektronik yang

diterbitkan Badan Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

"Jadi terhitung sejak formulir ini dikeluarkan maka posisi wabup sekarang menjadi Plt Bupati Bandung Barat," tuturnya.

Kondisi ini pernah terjadi di KBB pada masa kepemimpinan Bupati Abubakar periode 2013-2018. Karena tersangkut masalah hukum dan ditetapkan tersangka oleh KPK pada tahun 2018, maka Wakil Bupati Yayat T Soemitra naik menjadi Plt Bupati Bandung Barat menggantikan Abubakar hingga akhir masa jabatan.

Seperti diketahui KPK telah menetapkan status tersangka kepada Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dalam korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda KBB Tahun 2020.

Selain Aa Umbara, KPK juga menetapkan Andi Wibawa (AW) anak dari Aa Umbara dan Pemilik PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, M. Totoh Gunawan (MTG), sebagai tersangka dalam kasus ini. ● **pur**

Pasca Gempa, Tempat Wisata di Kab. Malang Tetap Beroperasi

MALANG (IM)- Sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tetap beroperasi normal usai gempa bumi yang melanda wilayah tersebut pada Sabtu (10/4), dengan kekuatan magnitudo 6,1 dan menyebabkan ribuan rumah mengalami kerusakan.

Kepala Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara mengatakan bahwa, hingga saat ini, belum ada instruksi dari Bupati Malang untuk menutup tempat wisata setelah terjadinya gempa bumi tersebut. "Memang sempat ada kekhawatiran setelah terjadinya gempa. Namun, sejauh ini tidak ada instruksi untuk penutupan pada pantai yang ada di wilayah Kabupaten Malang," kata Made, Selasa.

Made mengatakan, setelah terjadinya gempa bumi yang berpusat di 90 kilometer barat daya Kabupaten Malang dengan kedalaman 25 kilometer itu, diperkirakan masyarakat masih takut untuk melakukan wisata di kawasan pantai.

Menurut Made, ada kecenderungan bahwa masyarakat

masih takut terjadi gempa susulan pada saat berwisata di wilayah pantai. Namun, secara umum, daerah wisata di wilayah Kabupaten Malang saat ini masih beroperasi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. "Satu pekan ini kemungkinan dampak (gempa bumi), masyarakat tidak berwisata ke pantai," kata Made.

Sementara untuk daerah wisata lain seperti pegunungan, dan desa-desa wisata di wilayah Kabupaten Malang, Made mencatat tidak ada dampak akibat gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (10/4) tersebut.

Menurut Made, yang memberikan dampak cukup besar terhadap sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Malang adalah adanya pandemi penyakit akibat virus Korona. Pemerintah Kabupaten Malang masih berupaya untuk memulihkan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19. "Untuk wisata lain seperti air terjun juga tidak ada penutupan. Namun, memang karena masih dalam masa pandemi, sektor pariwisata masih belum maksimal," kata Made. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

KUNJUNGAN KERJA MENTERI PERDAGANGAN DI BANDUNG

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (tengah) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) berbincang dengan pedagang sayur saat melakukan kunjungan kerja di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/4). Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Menteri Perdagangan berkesempatan memantau harga kebutuhan pokok pada hari pertama puasa di Pasar Kosambi dan Pasar Sederhana.

Cegah Longsor Ji Cilebut Bogor, Tahun Depan SDA Jabar Bangun Tembok

Masyarakat setempat berharap pembangunan TPT tersebut segera dilakukan. Terlebih hujan masih sering mengguyur daerah tersebut membuat longsor rentan terjadi.

BANDUNG (IM)- Pembangunan tembok penguat tanah (TPT) di Ji Cilebut, Tanah Sareal, Kota Bogor, ada kemungkinan akan dimulai tahun depan. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Dicky Ahmad Sidik. "Ini sudah pernah disampaikan dan pernah disampaikan saat kunjungan Wakil Wali Kota Bogor ke kantor Dinas SDA Jabar," kata

Dicky, Selasa (13/4).

Pembangunan tembok antilongsor harus menunggu sampai tahun depan karena ketidakterdediaan anggaran di Dinas SDA Jabar untuk perbaikan TPT Saluran Empang Cisadane tersebut.

"Untuk anggaran 2021 belum masuk, akan didorong bisa dilaksanakan tahun depan. Karena, seperti sudah saya sampaikan, kaitan kebutu-

hannya cukup besar," tutur Dicky.

"Kalau dari usulan kota (untuk pembangunan TPT) sebesar Rp 70-an miliar, kalau tidak salah," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Ketua RT 02 RW 03, Sukaresmi, Syafei mengatakan petugas kerap meninjau lokasi bekas longsor tersebut. Namun dia juga belum diberi informasi terkait kapan akan dilakukan pembangunan TPT.

"Belum, belum pasti, rencana aja, banyak yang ngontrol-ngontrol mah soal longsor," ujar Syafei saat ditemui di rumahnya, 25 Maret lalu.

Petugas yang meninjau mulai dari Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor hingga kelurahan setempat. Terakhir, Rabu (24/3) lalu, tempat tersebut mendapat peninjauan untuk rencana pembangunan TPT.

"Kalau masalah ditinjau mah udah pernah, kemarin juga ada pengontrolan, katanya sih rencananya mah emang mau turap semua," kata dia.

Syafei berharap pembangunan TPT tersebut segera dilakukan. Terlebih hujan masih sering mengguyur daerah tersebut membuat longsor rentan terjadi.

"Memang gimana ya, lagi musim hujan gini ya longsor sih rawan, rawan longsor, ya maklum namanya ini jalan. Ya pengennya dipercepat aja,

ya maklum namanya keadaan begitu, kecil jalannya," jelas Syafei.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyatakan bakal menunggu Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memulai pembangunan tembok antilongsor di Cilebut itu. Pada Februari lalu, Pemkot Bogor sudah melengkapi data usulan ke Pemprov Jabar dan Pemkot Bogor juga memasukkan usulan pembuatan Tembok Penguat Tanah (TPT) ke Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jabar.

"Yang harus diintervensi sekitar 600 meter panjang. Mudah-mudahan bisa ditangani oleh Dinas SDA provinsi," ucap Dedie. ● **pur**

Awal Puasa, Harga Daging dan Cabai di Bogor Masih Tinggi

BOGOR (IM)- Pada hari pertama puasa bulan suci Ramadan, harga daging dan cabai di pasar tinggi. Kenaikan harga berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Pantauan komoditi kebutuhan pokok di pasar tradisional Bogor,

harga daging ayam broiler naik Rp5.000 dari Rp37.000 menjadi Rp42.000/Kg. Sedangkan ayam kampung dari Rp 70.000 menjadi Rp 75.000/ekor. "Walaupun naik, Alhamdulillah pembelinya naik dibanding minggu lalu yang relatif sepi," kata pedagang daging, Nanang.

Sementara harga Cabai merah naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 56.000/kg, untuk cabai rawit merah Rp 70.000 menjadi Rp 75.000/kg, sedangkan cabai hijau besar dari Rp 24.000 menjadi Rp 28.000/kg. Sedangkan komoditi sayuran cenderung tetap, sep-

erti jagung Rp12.000/kg naik Rp 1.000, untuk kentang Rp 14.000, sawi Rp 5.000, wortel Rp 8.000 harga stabil.

Daging sapi yang semula berkisar antara Rp110.000 hingga Rp115.000, kini mencapai Rp130.000. Salah satu pedagang, Andi menyebut

untuk daging sapi memang harganya naik sejak sepekan terakhir. Hal itu lantaran, permintaan mulai banyak. "Harganya memang sudah naik dari pemotongan. Karena permintaan banyak tapi jumlah sapi yang dipotong tetap," tambahnya. ● **gio**

DUGAAN KORUPSI PT PPE

Empat Tahun Penyelidikan Kejari Cibinong, tapi Belum Ada Tersangka

BOGOR (IM)- Nyaris empat tahun sudah penanganan kasus Perseroan Terbatas Prayoga Pertambangan dan Energi (PT. PPE) yang diduga merugikan uang rakyat senilai kurang lebih Rp80 miliar, namun sejauh ini masih belum diketahui tersangkanya. Padahal kasus dugaan ini melibatkan berbagai kalangan, bahkan sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejan) telah meminta keterangan penyelidikan dan pengembangan terhadap saksi.

Ironisnya, kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejan) Kabupaten Bogor sejak awal 2018 silam itu, hingga kini masih dalam tahap menunggu hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). "Terkait kasus PT. PPE itu masih berjalan, dan kita masih menunggu hasil audit dari BPK Pusat," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari-red) Kabu-

paten Bogor, Munaji saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, pada Senin (12/4) kemarin.

Ia melanjutkan, dalam kasus dugaan itu pihaknya masih belum bisa berbuat banyak, dan prosesnya masih dalam tahap penyelidikan. "Kasusnya kan sudah tahap penyelidikan, jadi persoalan itu masih tetap berjalan kok. Tenang saja, saya juga masih menunggu hasil audit dulu dari BPK," kilahnya.

Namun, ketika disinggung kapan waktu pasti hasil audit itu akan selesai dilakukan oleh BPK RI, Kajari menjawab, "Kita nggak tahu lah untuk kapan selesainya audit itu dilakukan, karena itu merupakan ranah BPK pusat. Kalau kita hanya menunggu saja," paparnya.

Menurutnya, audit yang dilakukan BPK RI bertujuan untuk mencari tahu terkait nilai kerugian negara yang dilakukan oleh direksi

PT. PPE milik Pemkab Bogor itu sewaktu dipimpin oleh Radjab Tampubolon. "Audit itu tujuannya untuk mencari tahu, kerugiannya berapa, kemana saja lainnya uang milik negara tersebut yang menyebabkan kerugian mencapai puluhan milyar tersebut," akunya.

Selain itu, masih kata Munaji, sampai saat ini untuk kasus dugaan PT. PPE sendiri masih belum menetapkan satu orang tersangka pun dari total puluhan orang yang dipanggil menjadi saksi. "Termasuk mantan Dirutnya pak Radjab Tampubolon itu sejauh ini masih berstatus saksi," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PT PPE) ditaksir mengalami kerugian Rp80 miliar. Yang mana uang sebesar itu adalah bagian dari dana penyerahan modal dari Pemkab Bogor kepada PT PPE yang totalnya mencapai Rp200 miliar. ● **gio**

ANTISIPASI KENAIKAN HARGA KEPOKMAS

Ridwan Kamil Siap Gelar Operasi Pasar

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya siap menggelar operasi pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) selama ramadhan hingga lebaran 2021.

Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat meninjau ketersediaan dan harga kepokmas bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI), Muhammad Lutfi di Pasar Kosambi dan Pasar Sederhana, Kota Bandung, Selasa (13/4).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengungkapkan, berdasarkan hasil tinjauannya, harga kepokmas di dua pasar tradisional di Kota Bandung itu terpantau relatif stabil.

Menurut dia, meski terdapat kenaikan harga, khususnya ayam potong dan minyak goreng, namun hal itu dinilai masih wajar mengingat kenaikan harganya relatif stabil.

"Harga-harga tetap stabil walaupun ada kenaikan, tapi wajar. Tadi kita mengecek hanya satu hingga dua komoditas saja, tapi masih relatif aman," ungkapnya.

Kang Emil juga mengatakan, masyarakat pun masih menilai wajar kenaikan harga tersebut mengingat saat ini bertepatan dengan momentum bulan suci ramadhan.

"Ukuran kepuasan publik itu kalau ibu-ibu merasa wajar kenaikannya karena ramadhan," ucapnya.

Meski begitu, Kang Emil

menyatakan, jika harga kepokmas tidak terkendali dan stok minim, dia memastikan bahwa Pemprov Jabar bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) serta pemerintah kabupaten/kota akan menggelar operasi pasar.

"Kalau mereka (masyarakat) sudah menjerit harga mahal, saya biasanya suka kontak Bulog gelar operasi pasar," katanya.

Sementara itu, Mendag, Muhammad Lutfi menuturkan, pantauan ke sejumlah pasar menjelang dan saat bulan suci ramadhan menjadi kegiatan rutin yang bertujuan untuk memastikan semua kepokmas dan kebutuhan penting lainnya tersedia.

"Seperti biasa menjelang dan saat ramadhan cek ke lapangan untuk memastikan semua barang pokok dan penting ada," kata Mendag.

Menurutnya, Pasar Kosambi yang merupakan pasar premium di tengah kota punya karakteristik yang sedikit berbeda dengan pasar induk dan tradisional. Meski begitu, dia memastikan bahwa secara keseluruhan, harga kepokmas di Pasar Kosambi relatif stabil, meski ada dinamika naik turun.

"Yang naik itu hanya minyak goreng," sebutnya.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng, kata Lutfi, pihaknya akan berkoordinasi dengan industri untuk menambah suplai minyak goreng, sehingga harga dapat ditekan. "Semoga minggu depan sudah ada penurunan," ujarnya. ● **pur**



IDN/ANTARA

BERMAIN MERIAM BAMBU

Sejumlah bocah bermain meriam bambu di Kampung Kampak, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (13/4) dini hari. Meriam bambu dengan menggunakan karbit dan air tersebut merupakan salah satu permainan tradisional yang biasa dimainkan saat Bulan Ramadan.

Banyak Toko Modern tak Berizin, Ini Langkah Pemkot Bandung

BANDUNG (IM)- Ratusan toko modern waralaba di Kota Bandung tak berizin. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama.

Dari data yang dimilikinya, dari 521 toko modern waralaba di Kota Bandung, hanya 300 toko modern yang mengantongi izin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi mengatakan, pihaknya sudah melakukan tindakan dan sejumlah toko modern sudah mendapatkan teguran.

"Kemarin ada limpahan dari Dinas Perdagangan, yang sudah dilimpahkan dua surat, ada beberapa minimarket kalau tidak salah ada enam," kata Idris di Balai Kota Bandung,

Selasa (13/4)

Pihaknya sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap pemilik toko modern itu.

"Kami lakukan pemanggilan dan pemeriksaan, yang tiga sudah teguran ketiga dan tiga lainnya sudah dalam proses pemeriksaan," jelasnya.

Saat disinggung, apakah toko modern itu tidak memiliki izin seluruhnya, Idris menyebut notabene tidak memiliki izin lengkap "Dia memiliki perizinan, tapi belum lengkap," tambahnya.

Saat ditanyakan apakah sudah diketahui data soal banyaknya minimarket yang tidak memiliki izin di Kota Bandung, Idris mengatakan, pihaknya belum mendapatkan data. "Kita belum, kami belum terima datanya," kata dia. ● **pur**



IDN/ANTARA

TAUSIYAH SECARA DARING DI BANDUNG

Anggota komunitas mempersiapkan peralatan untuk tausiyah secara daring oleh Ustad Abdurrahim Dany di Masjid Haur Kuning, Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/4). Komunitas Ojol mengaji berinisiatif untuk menggelar pengajian dan tausiyah secara daring di bulan suci ramadhan untuk mencegah kerumunan di tempat ibadah serta meminimalisir penyebaran COVID-19.